

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031) 3095361

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan semester 1 Tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	PARAF
IWAN SETYAWAN, AP, MM	SEKRETARIS	
AGUS HARYONO, SE. M.Si	PIL. KABID REHABILITASI SOSIAL	
MOHAMMAD AMINULLAH, S.Psi	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
DIDIK YANUARDI, SP	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL	
ENDANG RETNO SOERJANI, SAP	KABID PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Semester 1 Tahun Berjalan	 6
 Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 18
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan evaluasi kinerja sampai dengan semester 1 tahun berjalan dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/ Kota;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E);
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 / E);
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
- o. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah

program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2024 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta evaluasi kinerja sampai dengan semester 1 tahun berjalan.
2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2024 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja
Semester 1 Tahun Berjalan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Semester 1 Tahun Berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan sampai dengan semester 1 tahun berjalan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester 1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)*100
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	2 dokumen	7 dokumen	117

1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	6 dokumen	100
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	6 dokumen	100
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 dokumen	100
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100,00	8 Laporan	24 Laporan	100
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	49 org/bln	41 org/bln	41 org/bln	100,00	39 orang	129 org/bln	300
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 Dokumen	2 dokumen	67

1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	3 Dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 Dokumen	2 dokumen	67
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	100
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan /Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100,00	18 Laporan	54 laporan	100
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 dokumen	3 laporan	100
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100,00	14 Laporan	42 Laporan	100
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100

1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 buah	90 buah	90 buah	90 unit	100,00	0 paket	180 buah	#DIV/0!
1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 laporan	0 laporan	7 laporan	7 laporan	100,00	1 Dokumen	8 laporan	#DIV/0!
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 Dokumen	24 Laporan	67
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	93,77 %	93,77	100 %	97,92 %	98
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	36 Paket	100
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	36 Paket	100
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	36 Paket	100
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	12 Paket	20 Paket	56
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	36 Paket	100

1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	24 Dokumen	72 Dokumen	100
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90 Laporan	0 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100,00	40 Laporan	65 Laporan	72
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123 Laporan	1 Laporan	218 Laporan	218 Laporan	100,00	20 Laporan	239 Laporan	194
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	1 Dokumen	33
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	95,45 %	95,45	100 %	98,48 %	98
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	26 unit	66 unit	63 unit	95,45	0 unit	89 unit	#DIV/0!
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	100
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	2 Laporan	33

1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	100
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	66 %	66,00	100 %	88,67 %	89
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	15 Unit	18 Unit	129
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	17 Unit	19 Unit	19 Unit	100,00	5 Unit	41 Unit	410
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0 Unit	4 Unit	2 Unit	50,00	0 Unit	2 Unit	50
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	2 Unit	#DIV/0!
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	23 Unit	10 Unit	63 Unit	26 Unit	41,27	32 Unit	68 Unit	296
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	29 %	7,69 %	19 %	11,46 %	60,32	13 %	32,15 %	111

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	29 %	7,6 9 %	19 %	11,4 6 %	60,32 13 %	32,1 5 %	111	
1.06.02.2.03 .0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100,00	18 Orang	18 orang	100
1.06.02.2.03 .0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarg a	0 Keluar ga	263 5 Keluar ga	263 5 Keluar ga	100,00	50 Keluar ga	268 5 lapora n	1.790
1.06.02.2.03 .0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Lembag a	6 Lemb aga	14 Lemb aga	13 Lemb aga	92,86	13 Lemb aga	32 lemb aga	103
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	0,1 6 %	100 %	90,3 3 %	90,33 100 %	63,4 97 %	63	

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1850 orang	104 orang	746 orang	684 orang	91,69	550 orang	1338 orang	72
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.850 orang	64 orang	1311 orang	1274 orang	97,18	1260 Orang	2598 orang	140
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1890 orang	40 orang	2082 orang	2082 orang	100,00	1040 orang	3162 orang	167
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang	1000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	100,00	1000 Orang	4000 Orang	222

1.06.04.2.02 .0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	40 Orang	82 Orang	82 Orang	100,00	40 orang	162 orang	180
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	91,37 %	100 %	99,97 %	99,97	100 %	97,13 %	97
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100 %	91,37 %	100 %	99,97 %	99,97	100 %	97,13 %	97
1.06.05.2.02 .0001	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150.000 orang	0 orang	38.283 orang	38.283 orang	100,00	10.000 Orang	48283 orang	32
1.06.05.2.02 .0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5.580 Keluarg a	0 Keluar ga	2159 Keluar ga	2159 Keluar ga	100,00	1780 Keluar ga	3939 Keluar ga	71
1.06.05.2.02 .0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarg a	0 Keluar ga	1953 Keluar ga	1297 Keluar ga	66,41	40 Keluar ga	1337 Keluar ga	2.228
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	85,04 %	85,04	100 %	95,013 %	95
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 %	100 %	100 %	85,04 %	85,04	100 %	95,013 %	95

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	0 Orang	425 Orang	425 Orang	100,00	1000 Orang	1425 Orang	48
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	80	80,00	100 %	93,3 %	93
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	25 orang	30 orang	24 orang	80,00	24 Orang	73 orang	304
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	50 Makam	50 Makam	50 Makam	100,00	50 Makam	150 Makam	300
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengaman Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	100

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan semester 1 Tahun 2024

No.	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	96%	97%	100%	100%	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	85%	100%	100%	100%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

N O.	TUJUAN				SASARAN				KETERANG AN
	URAIAN	INDIKAT OR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	TARGET		
			2024	Perubah an			202 4	Perubah an	
1	Meningkatk an PPKS yang tertangani	Persentas e PPKS yang tertangani	6,22 %	6,22%	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100 %	100%	
2					Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS) dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial	13%	13%	
3					Meningkatnya tata kelola penyelenggar aan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	
						Nilai SAKIP	61	61	

Tabel 3.2

Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIA TAN	RENJA 2024						PERUBAHAN RENJA 2024						Selisih	CATA TAN PENTI NG (Alasa n Perub ahan)
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	LOKA SI	TARGET CAPAIAN KINERJA		ANGGA RAN	SUMB ER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	LOKA SI	TARGET CAPAIAN KINERJA		ANGGA RAN	SUMB ER DANA		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13 = 11 - 6	14
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinso s	100	Indeks	5.745.87 9.549	DAUM	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinso s	100	Indeks	5.153.68 0.611	DAUM	- 592.198 .938	
1.06.01.2. 01	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Dinso s	100	%	12.500.0 00	DAUM	Persentase dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Dinso s	100	%	1.554.60 0	DAUM	- 10.945. 400	
1.06.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	2	Dokum en	4.500.00 0	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	2	Dokum en	1.074.50 0	DAUM	- 3.425.5 00	
1.06.01.2. 01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dinsos	1	Lapora n	2.500.00 0	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dinsos	1	Lapora n	480.100	DAUM	- 2.019.9 00	

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Dinso s	100	%	4.112.520.569	DAUM	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Dinso s	100	%	4.033.625.941	DAUM	-78.894.628	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos	43	orang/bulan	4.102.520.569	DAUM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos	39	orang/bulan	4.031.904.441	DAUM	-70.616.128	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1	Laporan	608.700	DAUM	-1.891.300	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Dinsos	18	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Dinsos	18	Laporan	1.112.800	DAUM	-1.387.200	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinso s	100	%	5.000.000	DAUM	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinso s	100	%	496.500	DAUM	-4.503.500	
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dinsos	1	Dokumen	2.500.000	DAUM	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dinsos	1	Dokumen	283.700	DAUM	-2.216.300	

1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dinsos	14	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dinsos	14	Laporan	212.800	DAUM	- 2.287.200	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinsos	100	%	5.000.000	DAUM	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinsos	100	%	472.100	DAUM	- 4.527.900	
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12	Dokumen	5.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12	Dokumen	472.100	DAUM	- 4.527.900	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	100	%	188.760.000	DAUM	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	100	%	104.300.090	DAUM	- 84.459.910	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	3.500.000	DAUM	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinsos	2	Paket	1.105.976	DAUM	- 2.394.024	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	41.500.000	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	34.928.554	DAUM	- 6.571.446	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinsos	12	Paket	5.000.000	DAUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinsos	12	Paket	2.832.300	DAUM	- 2.167.700	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	24.740.000	DAUM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	12.951.000	DAUM	- 11.789.000	

1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	12	Paket	12.000.000	DAUM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	12	Paket	5.343.260	DAUM	- 6.656.740	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	12	Dokumen	15.520.000	DAUM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	12	Dokumen	8.020.000	DAUM	- 7.500.000	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos	40	Laporan	6.500.000	DAUM	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos	40	Laporan	8.925.000	DAUM	2.425.000	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Daerah	41	Laporan	50.000.000	DAUM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Daerah	20	Laporan	30.194.000	DAUM	- 19.806.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100	%	1.230.524.380	DAUM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100	%	970.364.380	DAUM	- 260.160.000	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	97.714.380	DAUM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	97.714.380	DAUM	0	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	962.810.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	872.650.000	DAUM	- 90.160.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100	%	191.574.600	DAUM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	100	%	42.867.000	DAUM	- 148.707.600	

1.06.01.2. 09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	14	Unit	170.574.600	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	15	Unit	23.852.000	DAUM	- 146.722.600	
1.06.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinsos	10	Unit	9.000.000	DAUM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinsos	10	Unit	8.040.000	DAUM	- 960.000	
1.06.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	23	Unit	12.000.000	DAUM	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	32	Unit	10.975.000	DAUM	- 1.025.000	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Kab. Bangkalan	100	%	1.145.160.000		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Kab. Bangkalan	100	%	1.126.099.100		- 19.060.900	

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Bangkalan	550	Orang	295.160.000	DAUM	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Bangkalan	1260	Orang	288.859.750	DAUM	- 6.300.250	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	550	orang	295.160.000	DAU Earmarked	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1260	orang	288.859.750	DAU Earmarked	- 6.300.250	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani	Kab. Bangkalan	1030	orang	850.000.000	DAUM	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani	Kab. Bangkalan	1030	orang	837.239.350	DAUM	- 12.760.650	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	730.000.000	DAUM	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	746.099.100	DAUM	16.099.100	

1.06.04.2. 02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	30	orang	120.000.000	DAU Earmarked	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	30	orang	91.140.250	DAU Earmarked	- 28.859.750	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Bangkalan	100	%	722.814.000	DAUM	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Kab. Bangkalan	100	%	635.560.000	DAUM	- 87.254.000	
1.06.05.2. 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	Kab. Bangkalan	100	%	722.814.000	DAUM	Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	Kab. Bangkalan	100	%	635.560.000	DAUM	- 87.254.000	
1.06.05.2. 02.0001	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Kab. Bangkalan	50.000	orang	300.000.000	DAUM	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Kab. Bangkalan	10.000	orang	200.000.000	DAUM	- 100.000.000	
1.06.05.2. 02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1850	Keluarga	400.000.000	DAUM	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1398	Keluarga	355.560.000	DAUM	- 44.440.000	
1.06.05.2. 02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	20	Keluarga	22.814.000	DBHC HT	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	39	Keluarga	80.000.000	DBHC HT	57.186.000	

1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bangkalan	100	%	550.000.000	DAUM	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Bangkalan	100	%	600.000.000	DAUM	50.000.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kab. Bangkalan	100	%	500.000.000	DAUM	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Kab. Bangkalan	100	%	550.000.000	DAUM	50.000.000	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	500.000.000	DAU Earmarked	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	709	orang	550.000.000	DAU Earmarked	50.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	Kab. Bangkalan	100	%	50.000.000	DAUM	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	Kab. Bangkalan	100	%	50.000.000	DAUM	0	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	24	orang	50.000.000	DAUM	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	29	orang	50.000.000	DAUM	0	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Bangkalan	13	%	375.000.000	DAUM	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kab. Bangkalan	13	%	248.580.400	DAUM	-126.419.600	

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	Kab. Bangkalan	29	PSKS	375.000.000	DAUM	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	Kab. Bangkalan	29	PSKS	248.580.400	DAUM	- 126.419.600	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18	orang	150.000.000	DAUM	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18	orang	130.783.000	DAUM	- 19.217.000	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	Keluarga	100.000.000	DAUM	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	Keluarga	60.297.400	DAUM	- 39.702.600	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	11	Lembaga	125.000.000	DAUM	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	12	Lembaga	57.500.000	DAUM	- 67.500.000	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	TMP Bangkalan	100	%	128.000.000	DAUM	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	TMP Bangkalan	100	%	61.976.150	DAUM	- 66.023.850	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	TMP Bangkalan	1	Unit	128.000.000	DAUM	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	TMP Bangkalan	1	Unit	61.976.150	DAUM	- 66.023.850	

1.06.07.2. 01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangk alan	50	Maka m	38.000.0 00	DAUM	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangk alan	50	Maka m	25.800.0 00	DAUM	- 12.200. 000	
1.06.07.2. 01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP Bangk alan	2	Lapora n	90.000.0 00	DAUM	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP Bangk alan	2	Lapora n	36.176.1 50	DAUM	- 53.823. 850	
						8.666.85 3.549						7.825.89 6.261		- 840.957 .288	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada perubahan renja tahun 2024 lebih diprioritaskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PPKS sesungguhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi pelayanan publik dasar. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk pelayanan sosial untuk PPKS menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Program-program penanganan PPKS pada hakekatnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam dan bencana sosial perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan dini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pelopor Perdamaian serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001